



Organisasi
Perburuhan
Internasional

Pulih dari Krisis:
Pakta Lapangan Kerja Global



Pulih dari Krisis:
Pakta Lapangan Kerja Global

Diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Internasional
Sesi ke-98,
Jenewa, 19 Juni 2009

ISBN 978-92-2-823482-4 (print)
978-92-2-823483-1 (web pdf)

Publikasi pertama 2010

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili ekspresi opini apapun dari sisi Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di banyak negara, atau langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Katalog atau daftar publikasi baru tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau melalui email: pubvente@ilo.org.

Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns

PENDAHULUAN

Pada tanggal 19 Juni 2009, Konferensi Perburuhan Internasional, yang dihadiri oleh delegasi pemerintah, pengusaha dan pekerja dari negara-negara anggota ILO, secara penuh sepakat untuk mengadopsi *Pulih dari Krisis: Pakta Lapangan Kerja Global*.

Instrumen kebijakan global ini menyikapi dampak sosial dan ketenagakerjaan dari krisis ekonomi dan finansial internasional. Instrumen ini mempromosikan pemulihan yang produktif, yang terpusat pada investasi, ketenagakerjaan dan perlindungan sosial.

Tujuan mendasar dari Pakta Lapangan Kerja Global ini adalah memberikan kesepakatan berbasis internasional dalam pengambilan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan dalam antara pemulihan ekonomi dan pemulihan dengan peluang pekerjaan yang layak. Ini menegaskan pentingnya aksi bersama di seluruh dunia: nasional, regional dan global.

Kepala Negara dan Pemerintahan, Wakil Presiden, Menteri Tenaga Kerja dan ketua organisasi pengusaha dan pekerja dari seluruh belahan dunia menyuarakan dukungan politik terhadap Pakta Lapangan Kerja Global pada Konferensi Tingkat Tinggi ILO mengenai Krisis Ketenagakerjaan Global yang diselenggarakan pada 15 – 17 Juni 2009. Pakta ini mendapat dukungan penuh dari Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dalam pesannya saat Konferensi tersebut.

Pakta ini merupakan respons yang kuat dari perwakilan pemerintahan, bisnis dan pekerja – para aktor dalam perekonomian riil – terhadap peningkatan pengangguran, setengah pengangguran dan pekerjaan informal di tingkat global. Peningkatan ini menambah beban permasalahan pasar tenaga kerja yang diulas Deklarasi ILO mengenai Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil (*ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization*) pada 2008.

Berkurangnya pekerjaan menyebabkan kesulitan bagi banyak pekerja perempuan dan laki-laki, keluarga dan masyarakat serta memperburuk kemiskinan. Hal ini juga mengancam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, memperlemah masyarakat kelas menengah, meningkatkan risiko terhadap kesatuan sosial dan mengikis kepercayaan kepada para pengambil keputusan.

Selain itu, dengan adanya 45 juta pendatang baru di pasar tenaga kerja global setiap tahunnya – kebanyakan para perempuan dan laki-laki muda –

sekitar 300 juta pekerjaan baru perlu diciptakan dari sekarang hingga tahun 2015 sekedar untuk menyeimbangi pertumbuhan angkatan kerja tersebut. Kita pun belajar dari pengalaman masa lalu bahwa pemulihan ketenagakerjaan berjalan lambat.

Kesemua ini menjelaskan mengapa krisis ketenagakerjaan global dapat bertahan selama bertahun-tahun kecuali keputusan-keputusan yang lebih kuat dan tepat sasaran segera diambil guna mempercepat pemulihan ketenagakerjaan seiring dengan pemulihan ekonomi.

Pakta Lapangan Kerja Global menawarkan seperangkat langkah kebijakan di mana negara-negara, dengan dukungan dari lembaga regional dan multilateral, dapat mengadopsinya guna memperkuat upaya-upaya yang sedang dilakukan dalam mengatasi krisis seraya berupaya mencapai keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pakta ini menyajikan sebuah portfolio terpadu dari kebijakan-kebijakan yang sudah diujicobakan, yang menempatkan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial sebagai fokus dari respons terhadap krisis. Kebijakan-kebijakan ini dapat disesuaikan dengan situasi nasional dan lokal dan banyak negara sudah melaksanakan beberapa dari kebijakan ini.

Pakta ini menganjurkan langkah dan kebijakan untuk:

- ♦ Mempertahankan perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan sejauh mungkin, dan menyokong usaha, khususnya usaha berskala kecil, menengah dan mikro;
- ♦ Mendukung penciptaan lapangan kerja dan mendorong investasi dalam sektor padat karya, termasuk pekerjaan ramah lingkungan (*green jobs*);
- ♦ Memfasilitasi masuknya kembali ke dalam pekerjaan dengan cepat dan mengatasi penurunan upah;
- ♦ Melindungi orang dan keluarga yang terkena dampak krisis, khususnya kelompok masyarakat yang paling rentan dan mereka yang berada dalam perekonomian informal dengan memperkuat sistem perlindungan sosial guna memberikan dukungan penghasilan dan mempertahankan mata pencaharian serta jaminan hari tua;
- ♦ Mempercepat pemulihan ketenagakerjaan dan memperluas peluang dengan mengambil tindakan simultan terhadap permintaan dan pasokan tenaga kerja; dan
- ♦ Membekali angkatan kerja dengan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan saat ini dan hari esok.

Pakta Lapangan Kerja Global didasarkan pada Agenda Pekerjaan yang Layak dan mengacu pada prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, mempromosikan kesetaraan gender dan mendorong aspirasi, keikutsertaan dan dialog sosial serta penting bagi pemulihan dan pembangunan.

Apabila diadopsi secara terpadu dan terkoordinasi, kebijakan-kebijakan ini dapat mengurangi ketegangan sosial, meminimalisir dampak negatif resesi terhadap masyarakat, mendorong permintaan agregat dan memperkuat baik ekonomi pasar kompetitif dan proses pertumbuhan yang lebih inklusif.

Singkatnya, Pakta Lapangan Kerja Global menyikapi baik agenda masyarakat maupun kebutuhan ekonomi yang sebenarnya.

Penting juga untuk diingat bahwa Pakta ini menyerukan pentingnya aksi kebijakan global yang terkoordinir guna memaksimalkan dampak positif atas lapangan kerja dan usaha yang berkelanjutan di seluruh dunia. Perhatian khusus diberikan kepada negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang serta negara dengan keterbatasan ruang kebijakan dan fiskal dalam merespons krisis ini.

Pakta ini meminta perhatian para negara donor dan badan multilateral untuk mempertimbangkan penyediaan anggaran, termasuk melalui sumber-sumber dana krisis yang ada, guna menerapkan rekomendasi-rekomendasi dan pilihan-pilihan kebijakan di dalam Pakta. Pakta ini pun dapat mendorong koordinasi dan pelaksanaan kebijakan yang lebih ketat dan efektif di antara semua organisasi internasional terkait, termasuk Persatuan Bangsa-Bangsa, institusi Bretton Woods, dan organisasi-organisasi regional serta bank-bank pembangunan.

Selain itu, Pakta ini mencerminkan komitmen ILO untuk memberikan dampak terhadap keputusan Dewan Eksekutif Utama PBB (United Nations Chief Executive Board/CEB) di bawah inisiatif bersama dalam menanggapi krisis, serta kontribusi terhadap G20 dan proses-proses pemerintahan lainnya.

Konstituen-konstituen tripartit ILO berkomitmen untuk menjalin kerjasama dalam mencapai keberhasilan Pakta Lapangan Kerja Global. Kesuksesan Pakta ini pun tergantung pada keputusan nasional dan internasional oleh pemerintah, bisnis, pekerja, parlemen, pihak yang berwenang di daerah dan masyarakat sipil serta lembaga donor dan multilateral. Bersama-sama, kita harus mengatasi krisis ketenagakerjaan global dan memberikan tanggapan yang diharapkan masyarakat terhadap para pemimpinnya.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi bulan Juli 2009, para pemimpin G8 menyatakan bahwa Pakta Lapangan Kerja Global “relevan sebagai respons terhadap krisis di tingkat dunia dan memajukan dimensi sosial globalisasi” dan

bahwa “negara maju, negara yang baru berkembang dan sedang berkembang serta organisasi internasional harus bekerja sama guna memastikan terjadinya pertumbuhan yang berorientasi pada ketenagakerjaan dan mempromosikan kesatuan sosial...”.

Dewan Ekonomi dan Sosial Persatuan Bangsa-Bangsa pada Juli 2009 mendorong negara-negara anggotanya untuk sepenuhnya memanfaatkan Pakta Lapangan Kerja Global dalam membentuk paket kebijakan mereka. Dewan tersebut juga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk mempertimbangkan pengintegrasian muatan kebijakan Pakta tersebut ke dalam sistem kegiatan-kegiatan Koordinator Daerah (*Resident Coordinator*) dan tim negara dalam mendukung respons terhadap krisis nasional.

Pakta ini melihat jauh melebihi persoalan pemulihan dengan segera. Empat hal yang menjadi fokus: (i) kerangka kerja finansial yang terawasi dan teregulasi yang sesuai dengan ekonomi riil, usaha yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak; (ii) perdagangan dan pasar bagi semua yang efisien dan teregulasi dengan baik, tanpa proteksi namun memperhatikan situasi negara-negara berpenghasilan rendah; (iii) bergeser ke ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan memiliki tingkat emisi yang rendah; dan (iv) jalur pembangunan yang memungkinkan semua – termasuk negara berkembang – untuk menempatkan pekerjaan dan perlindungan sosial sebagai fokus kebijakan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan mereka, dengan dukungan internasional.

Pakta ini, dan komitmen global tripartit yang mewakilinya, menawarkan peluang yang unik bagi negara-negara dan sistem multilateral untuk menanggapi krisis dengan visi bersama demi pencapaian pemulihan yang produktif dan seimbang, yang melindungi martabat manusia dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan ekonomi dunia serta proses globalisasi yang adil dan berkelanjutan.

Juan Somavia
Direktur Jenderal
Agustus 2009

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Mendengar para Kepala Negara, Wakil Presiden, Perdana Menteri dan semua peserta lain dalam Konferensi Tingkat Tinggi ILO mengenai Krisis Ketenagakerjaan Global.

Menerima proposal yang disusun Komite Konferensi Keseluruhan tentang Respons terhadap Krisis (*Conference Committee of the Whole on Crisis Responses*),

Mempertimbangkan peran penting dari Badan Pengurus dan Kantor Perburuhan Internasional dalam penerapan resolusi yang diadopsi oleh Konferensi,

Mengingat Agenda Pekerjaan yang Layak dan Deklarasi mengenai Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil sebagai cara menghadapi dimensi sosial dari globalisasi,

Pada hari kesembilanbelas bulan Juni tahun dua ribu sembilan, mengadopsi resolusi berikut ini.

PULIH DARI KRISIS: SEBUAH PAKTA LAPANGAN KERJA GLOBAL

I. RESPONS KERJA YANG LAYAK TERHADAP KRISIS

1. Krisis ekonomi global dan dampaknya berarti dunia menghadapi meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam waktu yang cukup lama. Lapangan kerja umumnya baru pulih beberapa tahun setelah pemulihan ekonomi. Di beberapa negara, pemulihan dari tingkat pekerjaan sebelumnya tidak memberikan kontribusi yang memadai terhadap perekonomian yang kuat, dan untuk mencapai pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki.
2. Usaha dan pekerjaan hilang. Upaya untuk menanggapi situasi ini harus menjadi bagian dari respons komprehensif apa pun.

3. Dunia harus melakukan yang lebih baik.
4. Terdapat kebutuhan akan pilihan-pilihan kebijakan global yang terkoordinir guna memperkuat upaya nasional dan internasional yang berpusat pada lapangan kerja, usaha yang berkelanjutan, layanan publik yang berkualitas, perlindungan terhadap masyarakat seraya menjaga hak dan mempromosikan aspirasi dan keikutsertaan masyarakat.
5. Hal ini akan memberikan kontribusi terhadap revitalisasi ekonomi, globalisasi yang adil, kemakmuran dan keadilan sosial.
6. Dunia harus terlihat berbeda setelah krisis.
7. Respons kita harus memberikan kontribusi terhadap globalisasi yang adil, ekonomi dan pembangunan yang lebih ramah lingkungan sehingga dapat menciptakan pekerjaan dan mempertahankan usaha secara efektif, menghargai hak-hak pekerja, mempromosikan kesetaraan gender, melindungi masyarakat yang rentan dan membantu negara-negara dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta memungkinkan negara untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium.
8. Pemerintah dan organisasi pekerja dan pengusaha berkomitmen untuk bekerja sama dalam menyukseskan Pakta Lapangan Kerja Global. Agenda Pekerjaan yang Layak dari Organisasi Perburuhan Internasional menjadi kerangka kerja untuk respons ini.

II. PRINSIP-PRINSIP UNTUK MEMPROMOSIKAN PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN

9. Aksi harus dipandu oleh Agenda Pekerjaan yang Layak dan komitmen yang dibuat oleh ILO dan para konstituennya dalam Deklarasi mengenai Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil pada 2008. Kita di sini menguraikan sebuah kerangka kerja untuk periode ke depan dan sebuah sumber daya kebijakan yang praktis untuk sistem multilateral, pemerintah, pekerja dan pengusaha. Kerangka ini memastikan kaitan antara kemajuan sosial dan pembangunan ekonomi serta mencakup prinsip-prinsip berikut ini:
 - (1) memberikan perhatian prioritas untuk melindungi dan menciptakan pekerjaan melalui usaha yang berkelanjutan, layanan publik yang berkualitas dan membangun sistem perlindungan sosial yang memadai untuk semua sebagai bagian dari aksi internasional dan nasional yang sedang dilaksanakan dalam rangka

- membantu pemulihan dan pembangunan. Langkah-langkah ini harus diterapkan secara cepat dan terkoordinir dengan baik;
- (2) meningkatkan dukungan bagi perempuan dan laki-laki yang rentan terkena dampak terparah dari krisis termasuk kaum muda yang berisiko, berupah rendah, berketerampilan rendah, pekerja di ekonomi informal dan pekerja migran;
 - (3) memfokuskan pada langkah-langkah mempertahankan pekerjaan dan memfasilitasi transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain serta mendukung akses ke pasar tenaga kerja bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan;
 - (4) membangun atau memperkuat layanan ketenagakerjaan publik yang efektif serta lembaga pasar tenaga kerja lainnya;
 - (5) meningkatkan akses dan peluang yang sama bagi pengembangan keterampilan, pelatihan dan pendidikan yang berkualitas sebagai persiapan pemulihan;
 - (6) menghindari solusi proteksionisme serta akibat negatif dari spiral penurunan upah dan kondisi kerja yang semakin memburuk;
 - (7) mempromosikan standar ketenagakerjaan inti dan standar ketenagakerjaan internasional lainnya yang mendukung pemulihan ekonomi dan ketenagakerjaan serta mengurangi ketidaksetaraan gender;
 - (8) mendorong keterlibatan dalam dialog sosial, contohnya keterlibatan tripartit dan perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja sebagai proses yang membangun guna memaksimalkan dampak dari respons krisis terhadap kebutuhan dari ekonomi riil;
 - (9) memastikan bahwa tindakan jangka pendek bersifat koheren dengan keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan;
 - (10) memastikan sinergi antara negara dan pasar serta regulasi ekonomi pasar yang efektif dan efisien termasuk kerangka hukum dan peraturan yang memungkinkan terciptanya usaha, usaha yang berkelanjutan serta mempromosikan terciptanya lapangan kerja lintas sektor; dan
 - (11) ILO, bersama dengan badan internasional, lembaga keuangan internasional dan negara-negara maju lainnya, memperkuat koherensi kebijakan dan memperdalam bantuan dan dukungan pembangunan bagi negara yang kurang berkembang, sedang berkembang dan dalam masa transisi dengan keterbatasan ruang fiskal dan kebijakan dalam merespons krisis yang ada.

III. RESPONS PEKERJAAN YANG LAYAK

10. Prinsip-prinsip di atas menetapkan kerangka kerja umum di mana tiap-tiap negara dapat menyusun sebuah paket kebijakan yang sesuai dengan situasi dan prioritas negara tersebut. Paket kebijakan ini harus sejalan dengan aksi lembaga-lembaga multilateral. Berikut adalah beberapa pilihan kebijakan.

MEMPERCEPAT PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, PEMULIHAN PEKERJAAN DAN MEMPERTAHANKAN USAHA

11. Untuk membatasi risiko pengangguran jangka panjang dan informalitas yang semakin meningkat, yang sulit untuk diatasi, kita perlu mendukung penciptaan lapangan kerja dan membantu masyarakat agar dapat bekerja. Untuk mencapai hal tersebut, kita sepakat untuk menempatkan tujuan pekerjaan yang produktif serta layak sebagai fokus dari respons terhadap krisis. Respons-respons ini dapat mencakup:
 - (1) mendorong permintaan yang efektif dan membantu mempertahankan tingkat upah termasuk melalui paket stimulus makroekonomi;
 - (2) membantu pencari kerja dengan:
 - (i) menerapkan kebijakan pasar tenaga kerja aktif yang efektif dengan sasaran yang tepat;
 - (ii) meningkatkan kompetensi dan sumber daya yang tersedia untuk layanan ketenagakerjaan publik sehingga para pencari kerja menerima dukungan yang memadai dan, ketika mereka bekerja dengan agen tenaga kerja swasta, memastikan bahwa layanan berkualitas diberikan dan hak-hak mereka dihormati; dan
 - (iii) melaksanakan program-program keterampilan kejuruan dan kewirausahaan untuk pekerjaan yang dibayar maupun bekerja sendiri;
 - (3) berinvestasi pada pengembangan keterampilan pekerja, peningkatan keterampilan dan keterampilan ulang untuk meningkatkan daya saing kerja, khususnya bagi mereka yang telah kehilangan ataupun berisiko kehilangan pekerjaan serta kelompok-kelompok rentan;

- (4) membatasi atau menghindari hilangnya pekerjaan dan mendukung usaha dalam mempertahankan angkatan kerja mereka melalui skema yang dirancang dengan baik dan diterapkan melalui dialog sosial dan perundingan bersama. Hal ini dapat mencakup pembagian kerja dan tunjangan pengangguran parsial;
- (5) mendukung penciptaan lapangan kerja lintas sektor ekonomi, mengenali efek berlapis dari upaya-upaya yang ditargetkan;
- (6) mengakui kontribusi usaha kecil dan menengah (UKM) dan usaha mikro terhadap penciptaan lapangan kerja, dan mempromosikan langkah-langkah, termasuk akses ke kredit yang terjangkau, yang akan memastikan adanya lingkungan yang mendukung bagi pengembangan usaha-usaha tersebut;
- (7) mengakui bahwa koperasi menyediakan pekerjaan di dalam masyarakat dari usaha yang sangat kecil hingga ke perusahaan multinasional dan menyesuaikan dukungan untuk mereka sesuai dengan kebutuhan;
- (8) menggunakan skema jaminan pekerjaan publik untuk pengangguran sementara, program kerja publik darurat, dan skema penciptaan kerja lainnya yang memiliki target yang tepat dan termasuk ekonomi informal;
- (9) mendorong lingkungan dan peraturan yang mendukung dan kondusif bagi penciptaan kerja melalui pendirian dan pengembangan usaha yang berkelanjutan; dan
- (10) meningkatkan investasi dalam infrastruktur, penelitian dan pengembangan, layanan publik dan produksi serta layanan “hijau” (ramah lingkungan) sebagai alat yang penting untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

MEMBANGUN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN MELINDUNGI MASYARAKAT

- 12 Sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan untuk membantu masyarakat yang rentan dapat mencegah meningkatnya kemiskinan, merespons kesulitan sosial, selain juga membantu menstabilkan ekonomi serta mempertahankan dan mempromosikan kemampuan kerja. Di negara berkembang, sistem perlindungan sosial juga dapat mengentaskan kemiskinan dan menyumbang pada pembangunan ekonomi nasional dan

sosial. Dalam sebuah situasi krisis, tindakan-tindakan jangka pendek untuk membantu masyarakat paling rentan dapat menjadi langkah tepat.

- (1) Negara-negara harus mempertimbangkan, apabila tepat, untuk melakukan langkah-langkah berikut:
 - (i) memperkenalkan skema bantuan tunai untuk kaum miskin guna memenuhi kebutuhan mereka dengan segera dan mengentaskan kemiskinan;
 - (ii) membangun sistem perlindungan sosial yang memadai untuk semua, berdasarkan jaminan sosial dasar yang meliputi: akses ke perawatan kesehatan, jaminan penghasilan bagi kaum tua dan penyandang cacat, tunjangan anak dan jaminan penghasilan dipadukan dengan skema jaminan pekerjaan publik untuk pengangguran dan pekerja miskin;
 - (iii) memperpanjang durasi dan cakupan tunjangan pengangguran (bersama dengan langkah-langkah yang relevan untuk menciptakan insentif kerja yang memadai dengan mengenali realitas pasar tenaga kerja nasional saat ini);
 - (iv) memastikan bahwa pengangguran jangka panjang terkait erat dengan pasar tenaga kerja melalui, contohnya, pengembangan keterampilan untuk menciptakan kemampuan kerja;
 - (v) menyediakan jaminan tunjangan minimum di negara-negara di mana dana pensiun atau kesehatan tidak lagi mendapatkan anggaran yang memadai guna memastikan bahwa pekerja terlindungi dengan layak dan mempertimbangkan cara melindungi tabungan pekerja dengan lebih baik melalui desain skema masa depan; dan
 - (vi) menyediakan cakupan yang memadai untuk pekerja sementara dan non-reguler.
- (2) Semua negara harus, melalui kombinasi dari dukungan penghasilan, pengembangan keterampilan dan penegakkan hak untuk kesetaraan dan non-diskriminasi, membantu kelompok-kelompok rentan yang terkena dampak terbesar dari krisis,
- (3) Guna menghindari dampak spiral penurunan upah, pilihan berikut harus menjadi panduan:
 - dialog sosial;
 - perundingan bersama;
 - upah minimum menurut undang-undang atau berdasarkan perundingan.

Upah minimum harus dikaji dan disesuaikan secara berkala. Pemerintah sebagai pengusaha dan pemasok harus menghargai dan mendorong tingkat upah yang ditetapkan.

Mempersempit kesenjangan upah berdasarkan gender harus menjadi bagian penting dari upaya ini.

13. Negara-negara yang memiliki sistem perlindungan sosial yang berjalan dengan kuat dan efisien memiliki mekanisme internal untuk menstabilkan ekonomi serta merespons dampak sosial dari krisis. Negara-negara ini perlu memperkuat sistem perlindungan sosial yang ada. Untuk negara-negara lain, prioritasnya adalah memenuhi kebutuhan yang mendesak seraya membangun pondasi untuk sistem yang lebih kuat dan efektif.

MEMPERKOKOH PENGHORMATAN TERHADAP STANDAR KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL

14. Standar ketenagakerjaan internasional menciptakan dasar dan mendukung hak-hak di tempat kerja serta menyumbang pada pembangunan budaya dialog sosial yang khususnya bermanfaat di masa-masa krisis. Guna mencegah lingkaran penurunan kondisi ketenagakerjaan dan mendorong pemulihan, penting untuk mengenali bahwa:
 - (1) Penghargaan atas prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja sangat penting bagi martabat manusia. Hal ini juga penting bagi pemulihan dan pembangunan. Karenanya, perlu untuk meningkatkan:
 - (i) kewaspadaan untuk mencapai penghapusan dan pencegahan bentuk-bentuk kerja paksa, pekerja anak dan diskriminasi di tempat kerja; dan
 - (ii) penghargaan atas kebebasan berserikat, hak untuk berorganisasi dan pengakuan yang efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama sebagai mekanisme yang memungkinkan dialog sosial yang produktif pada masa-masa meningkatnya ketegangan sosial, baik dalam ekonomi formal maupun informal.
 - (2) Sejumlah Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional, selain dari Konvensi pokok, juga relevan. Hal ini meliputi perangkat-perangkat ILO terkait kebijakan ketenagakerjaan, upah, perlindungan (jaminan) sosial, hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja, administrasi dan inspeksi

tenaga kerja, pekerja migran, kondisi kerja untuk kontrak publik, kesehatan dan keamanan kerja, jam kerja dan mekanisme dialog sosial.

- (3) Deklarasi Prinsip-prinsip Tripartit ILO mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial merupakan alat yang berguna dan penting bagi semua perusahaan, termasuk perusahaan dalam rantai pasokan, untuk merespons krisis dengan cara yang bertanggungjawab secara sosial.

DIALOG SOSIAL: BERUNDING BERSAMA, MENGIDENTIFIKASI PRIORITAS DAN MENDORONG AKSI

15. Khususnya di saat-saat meningkatnya ketegangan sosial, kokohnya penghormatan atas dan penggunaan mekanisme dialog sosial, termasuk perundingan bersama, yang tepat di semua tingkatan, merupakan hal yang amat penting.
16. Dialog sosial adalah mekanisme yang sangat berharga dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan prioritas nasional. Selain itu, dialog sosial merupakan basis yang kuat untuk membangun komitmen pengusaha dan pekerja dalam melakukan aksi bersama pemerintah yang diperlukan dalam mengatasi krisis dan mewujudkan pemulihan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, dialog sosial mendorong kepercayaan terhadap hasil yang dicapai.
17. Memperkokoh kapasitas untuk administrasi ketenagakerjaan dan inspeksi tenaga kerja sebagai sebuah elemen penting dalam aksi inklusif terkait dengan perlindungan pekerja, jaminan sosial, kebijakan pasar tenaga kerja dan dialog sosial.

IV. ARAH KE DEPAN: MEMBENTUK GLOBALISASI YANG ADIL DAN BERKELANJUAN

18. Agenda di atas erat terkait dengan dimensi globalisasi lainnya dan memerlukan koherensi kebijakan dan koordinasi internasional. ILO harus menjalin kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya.

19. ILO menyambut undangan G20, bekerja sama dengan organisasi terkait lainnya, untuk mengkaji langkah-langkah yang diambil dan diperlukan di masa mendatang.
20. Kami menegaskan dukungan kami terhadap peran ILO dalam Badan Eksekutif Utama PBB (CEB), yang dapat membantu menciptakan lingkungan internasional yang mendukung pemulihan krisis. Kami mendorong ILO untuk memainkan peran fasilitasi guna memastikan penerapan kebijakan sosial dan ekonomi yang efektif dan koheren terkait dengan hal ini.
21. Kerja sama terutama penting dalam hal-hal berikut ini:
 - (1) membangun kerangka kerja hukum dan pengawasan yang lebih kuat serta lebih konsisten di tingkat global untuk sektor keuangan sehingga dapat merespons perekonomian riil, mempromosikan usaha yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak serta melindungi simpanan dan pensiun masyarakat secara lebih baik;
 - (2) mempromosikan perdagangan dan pasar yang efisien dan teregulasi dengan baik yang menguntungkan semua pihak dan menghindari proteksionisme oleh negara-negara. Beragam tingkat perkembangan di masing-masing negara harus menjadi pertimbangan dalam menghapuskan hambatan perdagangan pada pasar dalam negeri dan luar negeri; dan
 - (3) beralih ke ekonomi beremisi rendah dan ramah lingkungan yang membantu percepatan pemulihan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan sosial, mendukung tujuan pembangunan dan mewujudkan pekerjaan layak dalam prosesnya.
22. Bagi banyak negara berkembang, khususnya negara-negara yang kurang berkembang, resesi global memperburuk keadaan pengangguran, setengah pengangguran dan kemiskinan struktural berskala besar.

Kita mengenali kebutuhan untuk:

- (1) memberikan prioritas yang jauh lebih besar untuk penciptaan peluang kerja yang layak dengan program yang sistematis, multidimensi dan memiliki sumber daya yang baik guna mewujudkan pekerjaan yang layak dan pembangunan di negara-negara kurang berkembang;
- (2) mendorong terciptanya pekerjaan dan peluang kerja yang layak melalui promosi dan pengembangan usaha-usaha yang berkelanjutan;

- (3) menyediakan pelatihan kejuruan dan teknis serta pengembangan keahlian kewirausahaan khususnya bagi kaum muda pengangguran;
 - (4) menanggulangi informalitas untuk mencapai transisi ke pekerjaan formal;
 - (5) mengenali nilai pertanian dalam ekonomi yang sedang berkembang dan kebutuhan atas infrastruktur pedesaan, industri dan pekerjaan;
 - (6) meningkatkan keberagaman ekonomi dengan membangun kapasitas untuk produksi dan layanan bernilai tambah guna mendorong permintaan dalam negeri dan luar negeri;
 - (7) mendorong masyarakat internasional, termasuk lembaga keuangan internasional, untuk menyediakan sumber daya guna melaksanakan aksi perbaikan di negara-negara yang menghadapi hambatan fiskal dan kebijakan;
 - (8) menjaga komitmen untuk meningkatkan bantuan guna mencegah terjadinya kemunduran terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium; dan
 - (9) mendorong komunitas internasional untuk memberikan bantuan pembangunan, termasuk dukungan anggaran, guna membangun basis perlindungan sosial di tingkat nasional.
23. Pemerintah harus mempertimbangkan pilihan seperti upah minimum guna mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan, meningkatkan permintaan dan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi. Konvensi Perbaikan Upah Minimum ILO, 1970 (No. 131), dapat memberikan panduan terkait dengan hal ini.
24. Krisis saat ini harus dipandang sebagai sebuah peluang untuk membentuk sebuah respons kebijakan kesetaraan gender yang baru. Paket pemulihan selama krisis ekonomi perlu mempertimbangkan dampak pada perempuan dan laki-laki serta mengintegrasikan isu gender ke dalam semua langkah-langkahnya. Dalam pembahasan mengenai paket pemulihan, baik mengenai rancangan mereka dan penilaian keberhasilan mereka, perempuan harus memiliki suara yang sama dengan laki-laki.
25. Memberikan dampak pada rekomendasi dan pilihan kebijakan Pakta Lapangan Kerja Global memerlukan pertimbangan pendanaan. Negara berkembang yang kekurangan ruang fiskal untuk mengadopsi respons dan kebijakan pemulihan memerlukan dukungan tertentu. Negara

donor dan badan multilateral diundang untuk memberikan pendanaan, termasuk sumber daya krisis yang ada, bagi penerapan rekomendasi dan pilihan kebijakan ini.

V. TINDAKAN ILO

26. ILO memiliki wewenang yang diakui di bidang-bidang kunci dalam merespons krisis dan mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Kapasitas ILO untuk penelitian dan analisis data sosial dan ekonomi menjadi penting dalam konteks ini. Keahliannya harus menjadi pusat dari program kerjanya bersama dengan pemerintah, mitra sosial dan sistem multilateral. Keahliannya meliputi, namun tidak terbatas pada:
- penciptaan lapangan kerja;
 - rancangan perlindungan sosial dan model pendanaan;
 - program pasar tenaga kerja yang aktif ;
 - mekanisme penetapan upah minimum;
 - institusi pasar tenaga kerja;
 - administrasi ketenagakerjaan dan inspeksi tenaga kerja;
 - program pekerjaan yang layak;
 - pembentukan dan pengembangan usaha;
 - standar ketenagakerjaan internasional–implementasi dan pemantauan;
 - dialog sosial;
 - pengumpulan data;
 - kesetaraan gender dalam pasar tenaga kerja;
 - program HIV dan AIDS di tempat kerja; dan
 - migrasi pekerja.
27. Kegiatan-kegiatan berikut ini hanya dapat memperkuat kerja-kerja praktis yang disebutkan di atas:
- ♦ Meningkatkan kapasitas negara untuk memproduksi dan menggunakan informasi pasar tenaga kerja, termasuk informasi mengenai tren upah, sebagai dasar untuk mengambil kebijakan

dan mengumpulkan serta menganalisis data secara konsisten membantu negara mengukur kemajuan mereka;

- ♦ Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai respons negara-negara terhadap krisis dan paket pemulihan yang mereka miliki;
- ♦ Menilai tindakan yang diambil dan diperlukan untuk masa mendatang, bekerja dengan organisasi terkait lainnya;
- ♦ Memperkuat kemitraan dengan bank-bank pembangunan daerah dan lembaga keuangan internasional lainnya;
- ♦ Memperkuat kapasitas diagnosa tingkat negara dan kapasitas layanan kebijakan; dan
- ♦ Memprioritaskan respons terhadap krisis dalam Program Nasional Pekerjaan yang Layak

28 ILO berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan serta bekerja sama dengan badan-badan lain untuk membantu para konstituen yang meminta bantuan dalam memanfaatkan Pakta Lapangan Kerja Global. Untuk itu, ILO akan dipandu oleh Deklarasi mengenai Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil Tahun 2008 beserta resolusi yang menyertainya.

Untuk informasi mengenai latar belakang respon ILO terhadap krisis, lihat:

Pernyataan oleh Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional kepada Komite Moneter dan Keuangan Internasional dan Komite Pembangunan (Washington, DC, 20-21 Oktober 2007)

www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/somavia/2007imfcdc.pdf

Pernyataan oleh Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional kepada Komite Moneter dan Keuangan Internasional dan Komite Pembangunan (Washington, DC, 12-13 April 2008)

www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/somavia/2008/ifi.pdf

Pernyataan oleh Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional kepada Komite Moneter dan Keuangan Internasional dan Komite Pembangunan (Washington, DC, 10-11 Oktober 2008)

www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/somavia/2008/imfc.pdf

Membentuk globalisasi yang adil: Perspektif dan prospek untuk Agenda Pekerjaan yang Layak, Dokumen diajukan ke Governing Body Working Party tentang Dimensi Sosial Globalisasi, November 2008

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_099853.pdf

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_100446.pdf

Pernyataan oleh Petugas Badan Pengurus ILO, 21 November 2008

www.ilo.org/What_we_do/Officialmeetings/gb/GBSessions/lang--en/docName--WCMS_100689/index.htm

Laporan Pertemuan Tripartit Tingkat Tinggi tentang Krisis Ekonomi dan – kesimpulan Ketua, Maret 2009

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_104129.pdf

Pernyataan oleh Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional kepada Komite Moneter dan Keuangan Internasional dan Komite Pembangunan (Washington, DC, 25-26 April 2009)

www.ilo.org/public/english/bureau/dgo.speeches/somavia/2009/ifi.pdf

Pemulihan dari Krisis Pekerjaan Global melalui Kebijakan Pekerjaan yang Layak-Laporan dari Direktur Jenderal pada Konferensi Buruh Internasional, Sesi ke-98, Rabu, 3 Juni 2009

www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/ILCSessions/98thSession/ReportssubmittedtotheConference/lang--en/docName-WCMS_106162/index.htm

Presentasi oleh Direktur Jenderal mengenai Laporrannya pada Konferensi Buruh Internasional, Provincial Record No.6, Sesi ke-98, Rabu, 3 Juni 2009
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_107632.pdf